

**SANKSI NYONGKOK SEBAGAI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF NASABAH, PENGURUS LPD, DAN HUKUM ADAT  
(Studi Kasus Pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu,  
Kabupaten Buleleng)**

Oleh

**WP Kartika Putri, NIM 1617051008  
Program Studi S1 Akuntansi**

**ABSTRAK**

Lembaga Perkreditan Desa merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa yang mengelola dana yang berasal dari masyarakat untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan desa, haruslah memiliki sistem pengendalian internal yang baik untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimanakah latar belakang diterapkannya sanksi adat *nyongkok* pada LPD Desa *Pakraman* Telaga, (2) apa sajakah jenis-jenis sanksi adat *nyongkok* yang diterapkan, dan (3) bagaimanakah implikasi sanksi adat *nyongkok* terhadap penyelesaian kredit macet pada LPD Desa *Pakraman* Telaga. Penelitian ini dilakukan di LPD Desa *Pakraman* Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) latar belakang diterapkannya sanksi *nyongkok* adalah untuk mengikat nasabah agar ingat dengan kewajiban untuk mengembalikan semua pinjaman beserta bunga sekaligus menjadi kekuatan bagi keberlangsungan LPD Desa *Pakraman* Telaga dan untuk memberikan efek jera bagi nasabah, (2) jenis sanksi *nyongkok* berupa tidak mendapatkan pelayanan di desa dalam berbagai upacara agama terkecuali kematian dengan segala kewajibannya tetap berjalan seperti biasa, dan (3) implikasi yang muncul dari penerapan sanksi adat *nyongkok* ini adalah eksistensi awig-awig tetap terjaga untuk mengatur masyarakat, terjaganya keberlangsungan LPD Desa *Pakraman* Telaga sebagai penunjang perekonomian desa, timbul ketakutan tidak memiliki kemampuan untuk melunasi pinjaman, dan timbulnya rasa malu akibat diumumkan sebagai nasabah yang terkena sanksi adat *nyongkok* saat paruman tumpek bersama masyarakat.

**Kata kunci:** LPD, Implikasi, Sanksi, *Nyongkok*

**NYONGKOK SANCTION AS AN INTERNAL CONTROL  
SYSTEM IN THE SETTLEMENT OF BAD DEBTS FROM THE  
PERSPECTIVE OF CUSTOMERS, ADMINISTRATORS OF  
VILLAGE CREDIT INSTITUTIONS, AND CUSTOMARY LAW  
(Case Study on Village Credit Institution of Telaga Village,  
Busungbiu District, Buleleng Regency)**

By

**WP Kartika Putri, NIM 1617051008  
Undergraduate Study Program of Accounting**

**ABSTRACT**

*Village Credit Institution (LPD) is a village-owned financial institution that manages funds from the community to improve the economy and development of the village, that must have an internal control system that can increase public trust. This study aims to find out: (1) how is the background of applying nyongkok customary sanction to the LPD at Desa Pakraman Telaga, (2) what are the types of nyongkok customary sanction that are applied, and (3) how are the implications of applying nyongkok customary sanction in the settlement of bad debts on LPD at Desa Pakraman Telaga. This research was conducted at the LPD at Desa Pakraman Telaga, Busungbiu District, Buleleng Regency. This study uses qualitative methods. The data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study stated that (1) the background that applying nyongkok customary sanction is to bind customers to remember the responsibility to repay all loans along with interest as well as being a strength for the sustainability of the LPD at Desa Pakraman Telaga and to provide a deterrent effect for customers, (2) the type of nyongkok customary sanction is not getting served in the village in religious ceremonies except death and all the obligations proceed as usual, and (3) the implications that arise from the application of nyongkok customary sanctions is the existence of awig-awig is maintained to regulate society, the existence of LPD at Desa Pakraman Telaga as a support for the village economy, fear arises not having the ability to repay loans, and there was the emergence of shame when announced as a nyongkok sanction customer during a meeting with the community.*

**Keywords:** LPD, Implication, Sanction, Nyongkok